

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI
HASIL DALAM AKAD *MUDHARABAH*
(Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Nur Laila Sa'diyah
122311089

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Laila Sa'diyah
NIM : 122311089
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam
Akad *Mudharabah* (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)
Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

8 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 (S 1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 15 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 19660407199103 1 004

Penguji I

MOH.ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012199703 1 002

Pembimbing I

Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji II

NUR HIDAYATI, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001
Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp (024)7601291 Fax 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Dekan Fakultas Syariah
Uin Walisongo Semarang
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdra. Nur Laila Sa'diyah
Kpd. Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Nur Laila Sa'diyah
NIM : 122311089
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Mei 2019
Pembimbing 1

Drs. SAHIDIN, M.SI
NIP. 19670321 199303 1 005

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ.....

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...” (QS.al-Baqarah :286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan bangga tetap pada kerendahan hati, penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Samsuri dan Ibu Supatmi tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan.
2. Adikku Siti Luthfin Nuriyah yang selalu memberi semangat.
3. Saudara-saudaraku semua yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
4. Teman-teman Kos Assyifa
5. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pn pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 23 Mei 2019

Deklarator,



Nur Laila Sa'diyah

122311089

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pada dasarnya teori *mudharabah* dalam teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan teori-teori *mudharabah* sesungguhnya. Dalam teori *mudharabah* pembiayaan digunakan sebagai tambahan modal kerja dan bagi hasil diambil dari keuntungan atau kelebihan modal kerja bukan dari prosentase jumlah pinjaman. Akan tetapi yang terjadi di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk hal yang konsumtif juga produktif dan bagi hasil diambil dari prosentase jumlah pinjaman. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut bagaimana praktek pelaksanaan bagi hasil dalam akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dan bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek bagi hasil dalam akad *mudharabah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah. Ditinjau dari segi hukum penelitian ini merupakan penelitian *normative-empiris*, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat dengan kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan beberapa anggota yang ada di KSPSS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka al-Quran, al-Hadits, buku-buku. Metode Analisis penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (mengambarkan secara jelas apa yang telah diteliti dan kemudian diambil kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Bagi Hasil di KSPPS BMT NU Sejahtera dalam akad pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan fatwa DSN, adapun peraturan

Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Blora yaitu 1,4% diambil dari prosentase jumlah pinjaman bukan dari keuntungan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Sahidin wakil Dekan Satu Fakultas Syariah sekaligus pembimbing I. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Arif Junaidi selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Afif Noor selaku Ketua Program Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Supangat selaku sekretaris jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Seluruh dosen pengajar program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini

Semarang, 23 Mei 2019

Penulis



Nur Laila Sa'diyah

122311089

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek dan Panjang

1. □ = a
2. □ = i
3. □ = u

C. Diftong

ي □ = ay

و □ = aw

D. Syaddah (□)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya

□ الطّب *at-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina’ah*. *Al* – ditulis dengan huruf konsonan kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’ Marbutah

Setiap *ta’marbutah* ditulis dengan ‘h’ misalnya الطبيعة المعشة = *al-ma’isyah al-thabi’iyyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	19
3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisa Data.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI *MUDHARABAH* DAN BAGI HASIL

A. Tinjauan Umum <i>Mudharabah</i>	25
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	31
3. Dasar Fatwa DSN-MUI No. 07/ DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	34
4. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i>	39
5. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	42
6. Asas-asas Perjanjian <i>Mudharabah</i>	45
7. Manfaat <i>Mudharabah</i>	47
8. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	48
9. Pelaksanaan dan Skema <i>Mudharabah</i>	49
B. BAGI HASIL	50
1. Pengertian Bagi Hasil	50
2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil	51

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU SEJAHTERA

A. PROFIL KSPPS BMT NU Sejahtera	55
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Sejahtera	55
2. Tujuan, Visi dan Misi KSPPS BMT NU Sejahtera	60

3. Struktur organisasi KSPP BMT NU Sejahtera	62
4. Produk-produk dan Jasa KSPP BMT NU Sejahtera	63
B. APLIKASI PRAKTIK PELAKSANAAN BAGI HASIL AKAD <i>MUDHARABAH</i> DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA	72

BAB IV PRAKTEK BAGI HASIL AKAD MUHARABAH

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora Menurut Fatwa DSN NO 07/DSN-MUI/IV/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	91
B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
C. Penutup.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting, apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹ Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.²

Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan,

¹ Faturrahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) 1997, hal. 71

² Muhammad Abdul Mannan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 27

pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut di atur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kaduniaan.

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Sesuai labelnya, bank syariah adalah instrument keuangan yang berbasis syariah Islam. hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan

produk bank konvensional. Karena adanya pelarangan riba, gharar, maysir.

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Dalam produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan prinsip *wadhiyah*, *qard*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan pola jual beli, dengan prinsip *murabahah*, salam, dan istisna', dan pola sewa dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.³

Lembaga keuangan syariah sekarang ini telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syariah itu antara lain BMT, asuransi syariah, bank syariah dll. Lembaga Keuangan Syariah ini dalam bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan dengan margin. BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Mal (sosial/tabarru) dengan kegiatan

³Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.1-2.

menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat , infaq maupun shodaqoh.⁴ .

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam hukum Islam jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan dan bahkan mencapai puluhan. Namun demikian, dari sejumlah akad-akad tersebut, hanya ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah, yaitu murabahah, istishna' dan salam.⁵

Dengan melihat begitu kompleknya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

⁴ Mukhalul Ilmi, “Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah”, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 2.

⁵ Muhammad, “Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syari’ah”, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.22

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ”. (QS.Al-Maidah:2)*

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha, produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan. Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi

perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.⁶

Mudharabah yaitu suatu konsep kerjasama antara pemilik dana dengan tenaga kerja (pemilik keahlian). Yang mana *mudharabah* menurut ahli fiqih adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.⁷

Akad Mudharabah adalah sistem kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelola tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.⁸

⁶ Agustianto, “*Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), hal. 123

⁷ Muhammad Muslehuddin, PhD, “*Sistem Perbankan dalam Islam*”, (Jakarta: cet. 3 PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 68

⁸ Saat Suharto, “*Pedoman Akad Syariah*”, (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2014), hal. 100-101

Dalam praktik pembagian keuntungan, ada dua metode yang digunakan dalam menentukan bagi hasil, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Metode profit sharing dilakukan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode revenue sharing dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.¹⁰ Keuntungan dibagi untuk si pemodal dan pekerja dan tidak boleh ada syarat untuk pihak ketiga karena sipemilik modal mengambil keuntungan karena pekerjaannya, dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya. Keuntungan juga harus

⁹Muhammad, “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.96.

¹⁰H.Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*”, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hal 143.

diketahui oleh keduanya dengan semua rinciannya seperti sepertiga, seperempat, setengah.¹¹

Akan tetapi praktek yang terjadi di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora bertentangan dengan hukum islam dan fatwa DSN-MUI No.07/DSN MUI/IV/2000. Penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan sepihak oleh BMT yaitu 1,4% untuk nasabah dan perhitungan bagi hasil sesuai dengan jumlah pinjaman bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan *mudharabah* ini tidak hanya di gunakan untuk usaha yang produktif tapi yang lainnya juga. Tentu ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN MUI/IV/2000 pada ketentuan pembiayaan dan rukun dan syarat pembiayaan . Pada ketentuan pembiayaan point (1) dijelaskan Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Sedangkan rukun dan syarat pembiayaan pada point (4) bagian a dijelaskan bahwa Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: yaitu Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*”, (Jakarta:AMZAH,2014), hal 259-260.

disyaratkan hanya untuk satu pihak. Padahal seharusnya nisbah bagi hasil ditentukan oleh kedua belah pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Akan tetapi pada praktek dilapangan tidak diterapkan sistem tersebut yang seharusnya bagi hasil itu di tentukan oleh kedua belah pihak seperti 60% untuk nasabah dan 40 % untuk bmt, dan diambil dari keuntungan yang di dapat bukan dari jumlah pinjaman.

Dengan adanya permasalahan di atas terkait pembiayaan *mudharabah*, maka penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dengan mengangkatnya mejadi sebuah judul skripsi ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH” (Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui praktek bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji dari segi Hukum Islam mengenai praktik bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora.

2. Manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan untuk penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora.
- b. Memberi manfaat bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil research terdahulu berkenaan dengan permasalahan yang serupa untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil, berbagai buku dan literatur telah banyak yang membahas, namun pembahasan yang berkaitan tentang penentuan bagi hasil dan sebagaimana dimuat dalam berbagai hasil penelitian tersebut meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah, mahasiswi angkatan 2002 Fakultas Syari'ah Dengan judul "Pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa". ini menyimpulkan konsep *mudharabah* yang di munculkan oleh Siti Zubaidah sangat relevan. Didalam praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan kaidah fiqh karena dalam prakteknya sama saja dengan jual beli dimana bagi hasil ditentukan di awal. Untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong harus melewati prosedur-prosedur yang sangat rumit dan tidak ada pengawasan secara khusus dalam akad kerja sama ini sehingga pihak BMT kurang mengetahui secara pasti tentang pengalokasian dana yang telah diberikan nasabah. Jadi pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan syari'ah.¹² Adapun perbedaannya dengan peneliti ini adalah bahwa peneliti Siti Zubaidah Pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa, sedangkan penelitian ini terkait dengan praktek bagi hasil yang diambil dari jumlah pinjaman.

¹² Siti Zubaidah, "Pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Ben Taqwa", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2002.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Infarul Ghoy dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan *Mudharabah* Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)”. skripsi ini menjelaskan tentang bagi hasil yang diterapkan di BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta dalam simpanan *mudharabah* berjangka dan ditinjau dari hukum Islamnya apakah bagi hasil yang diterapkan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan muamalah. Penerapan bagi hasil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah secara keseluruhan yaitu dari penerapan ketentuan pembagian hasil sampai pada perhitungan bagi hasilnya.¹³ Adapun perbedaannya dengan peneliti ini adalah meskipun terlihat sekilas hampir sama karena sama-sama meneliti bagi hasil dalam *mudharabah* namun penelitian ini fokus pada perhitungan bagi hasil yang diambil dari jumlah pinjaman bukan jumlah keuntungan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Harir Ulil Albab (2006) dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan

¹³ Infarul Ghoy, “Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan *Mudharabah* Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Rizki Mandiri Amratani Yogyakarta)”. Skripsi (Tidak Diterbitkan), Yogyakarta Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Islam Buana Kartika Mranggen Demak”. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di LKI Buana Kartika sesuai dengan konsep muamalah, karena menggunakan syirkah uqud, di mana pihak LKI memberikan modal usaha kepada pedagang yang sudah menjalankan usaha.¹⁴

Keempat, skripsi yang berjudul “ Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktek *Mudharabah* di Baitul Mal wa Tamwil at-Taqwa kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya”, skripsi ini lebih menekankan pada aspek manajemen yang lebih professional dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh hukum Islam dapat dibenarkan. Mengenai bagi hasilnya menggunakan penetapan keuntungan dengan angka konkrit, dan yang demikian tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.¹⁵

Kelima al-Ahkam Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam dengan judul “Menelaah *Mudharabah* Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”,

¹⁴ M.Harir Ulil Albab, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

¹⁵ Asep Ermansyah, “*Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktek Mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil at-Taqwa kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

oleh Ali Murtadho. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan tentang *mudharabah* sebagai praktek pengembangan modal. Praktek *mudharabah* ini dianggap sebagai sarana tolong menolong dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip dasar muamalah. Agar supaya praktek tersebut terhindar dari unsur riba.¹⁶

Keenam, jurnal ekonomi yang ditulis oleh nur fatoni dengan judul "Penguatan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis Pada Baitut Tamwil Tamziz Wonosobo". Pada jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa akad *mudharabah* pada pembiayaan di baitut Tamwil Tamzis ini dilatarbelakangi karena kebutuhan akad yang sesuai dengan syariah yang dilakukan oleh para pedagang pasar yang mikro, dengan skim pembiayaan yang lebih kecil. Akad ini didasarkan atas motifasi ingin kembali ke akad syariah.¹⁷

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Jumadi dengan judul "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Usaha Mikro Pada

¹⁶ Ali Murtadho, "Menelaah *Mudharabah* Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam", vol. XXII, edisi 1, maret 2012, hal.76.

¹⁷ Nur Fatoni, "Penguatan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis Pada Baitut Tamwil Tamziz Wonosobo", vol.II, Edisi 2, November 2012, hal.24.

Baitul Qiradh Abu Indrapuri”. Pada jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa praktik bagi hasil keuntungan pembiayaan *mudharabah* pada BQ Abu Indrapuri belum sempurna sesuai dengan aturan fiqih, karena keuntungan ditetapkan sepihak diawal kontrak terhadap jenis pembiayaan yang belum bisa dipastikan untung apa rugi.¹⁸

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Hermansyah dengan judul ”Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000”. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan tentang pembagian keuntungan boleh dibagi dengan metode profit sharing atau revenue sharing.¹⁹

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas tentang pelaksanaan praktik bagi hasil akad *mudharabah*, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah

¹⁸ Jumadi, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/share/article/vies/1419/1037>), diakses 18 November 2018 pukul 23.36

¹⁹ Hermansyah ”Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip *Mudharabah* Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000”, (<https://jurnal.unsur.ac.id/jmi/article/download/350/283>), di akses 18 November 2018 pukul 23.42.

penulis paparkan diatas. Penulis merasa tertarik untuk membahas judul tersebut dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.²⁰ Penulis akan melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis melakukan telaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social), maupun lembaga pemerintah.²¹

²⁰ Samiaji Sarosa, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta:PT.Indeks, 2012), hal. 36.

²¹ Sumardi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, *Cet. Ke-II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 22

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²² Dalam hal ini peraturan yang digunakan yaitu dan fatwa DSN-MUI No.07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Terkait dengan penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan sepihak oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora yaitu 1,4%.

²² Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.105-106.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.²³ Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan karyawan KSPPS BMTNU Sejahtera yaitu staff admin, teller, marketing, pengurus KSPPS BMT NU Sejahtera Pusat dan nasabah.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder umumnya tidak di rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu, akan tetapi peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan pada paktik bagi hasil akad mudharabah. Data sekunder berupa brosur, profil BMT NU Sejahtera dan foto.

²³Etta Mamang Sangadji, Supiah, “*Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Peneliitian*”, (Yogyakarta: CV Andi Offfset 2010), hal. 171.

Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian ini diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No.07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan teori-teori yang berkaitan dengan akad *mudhrabah*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu. Diantaranya adalah makalah, artikel, majalah, jurnal, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁴
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²⁵

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", ((Jakarta:Raja Grafindo Persada:2006), hal.32.

²⁵ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 185.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden caranya adalah dengan bercakap-cakap.²⁶ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini berbentuk bicara obrolan dan selama wawancara informan kadang-kadang lupa bahwa ia sedang diwawancarai.²⁷ Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait, yakni: karyawan BMT, pengurus BMT Pusat dan nasabah.

b) Dokumentasi

²⁶ H.Afifuddin, Beni Hmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal.131

²⁷ Evi Martha, Sudarti Kresno, *Metodologi penelitian kualitatif untuk bidang kesehatan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hal.55.

Selain dengan wawancara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data- data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya²⁸, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, sebab dari analisis ini akan diperoleh temuan. Dalam melakukan analisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitik, yakni teknik analisis yang menggambarkan objek penelitian secara terperinci.

Dilihat dari jenis penelitiannya yang kualitatif, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam analisis data, diantaranya:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal.182.

Pertama, Reduksi data yaitu data yang diperoleh dalam lapangan diuraikan secara terperinci, cari yang menjadi titik focus penelitian dan disusun secara sistematis.

Kedua, display data yaitu membuat gambaran penelitian dalam bentuk matriks atau grafik dan lainnya.

Terakhir, setelah beberapa data sudah jelas dan penulis telah menemukan makna data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan dan verifikasi.²⁹

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis data secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam menulis skripsi ini, berikut ini penulis jelaskan dalam sistematika

²⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta:STAIN Po PRESS, 2010), hlm.85-86.

penulisan. Dan secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini penulis akan membahas konsep *mudharabah* yang meliputi; pengertian *mudharabah*, rukun *mudharabah*, syarat-syarat *mudharabah*, penerapan bagi hasil akad *mudhorobah*.

BAB III : Bab ketiga berisi Gambaran Umum BMT NU Sejahtera , tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk pembiayaan.

BAB IV : Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsbab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI *MUDHARABAH* DAN BAGI HASIL

A. Tinjauan Umum *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.¹ Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu.²

Sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 119

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001), hal. 127

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.J-ART, 2005), hal. 107.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi*’ yaitu usaha dalam perniagaan. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qathu’u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan.⁵ Menurut kamus besar bahasa arab *mudharabah* berasal dari kata *ضرب- يضرب*

⁴ Muhammad Syafi’i Antonia, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hal. 160

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004), hal.217.

ضربا yang berarti memukul atau berjalan.⁶ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁷

Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank islam. prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati.⁸

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang beniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan usaha produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi di antara mereka

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989), hal.227

⁷M.Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 344

⁸ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), hal.33.

menurut kesepakatan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akan tetapi apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya.⁹

Pengertian *mudharabah* menurut para ulama' berbeda-beda pendapat, diantaranya sebagai berikut:

Menurut para Fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* dalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada pihak yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT,RajaGrafindo Persada,2015,), hal.60-61.

عقد على لشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعم
من الآخر

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta
dan pihak lain pemilik jasa.”

Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على ان يتجر
بخصوص النقدين (الذهب والفضة)

“Dalam akad perwakilan, pemilik harta
mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”

Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah:

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرًا معينًا من ماله إلى من يتجر فيه
بجزء مشاع معلوم من ربحه

“ Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan
ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan
bagian dari keuntungan yang diketahui.”

Ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لا آخر ما لا ليتجر فيه

“ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan
hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan
(diperdagangkan).”

Zaid sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹⁰

Wahbah zuhaili mengartikan *mudharabah* sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.¹¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Selanjutnya, pada point kedua dalam Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebaga *mudharib* atau pengelola usaha.¹²

¹⁰Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.189-190.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 476.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah

Dari penjelasan paraulama diatas kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik harta (sebagai investor) dengan pengelola modah tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, dalam akad *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *Mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan *mudharabah* antara lain:

QA.Al- Muzzamil ayat 20

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

Artinya: ".....dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagai karunia Allah.... (QA.Al-Muzammil:20)"¹³

Selanjutnya terdapat juga dalam QS.an-Nisa:29

¹³Departemen Agama RI, Al-qur'anulkarim, (Syaamil International, 2007), hal.575

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS.An-Nisa:29).

Penjelasan *mudharabah* lainnya juga terdapat dalam QS-al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (QS.A-Baqarah:198)

b. Hadis

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra. Bahwasannya Rasulullah saw, telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Hadis Nabi Riwayat Tabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Ijma’

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliyah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, “Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh. Para sahabat banyak melakukan akad

mudharabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya.” Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma'*.¹⁴

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *Musaqah* (mengambil upah untuk menyirami tanaman).

e. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*¹⁵

3. Dasar Fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid 4, Jakarta: Cet I, Pena Pundi Aksara, 2006, hal.210

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*), hal.3

Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama'Indonesia menetapkan pembiayaan *mdharabah* sebagai berikut:

1. Ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*
 - a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.
 - b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
 - c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dari pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
 - d. Mudhorib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam managem perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 - j. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁶
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*
- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh), h.3-4

- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik

secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁷

4. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan rukun *mudharabah*, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada dua, yaitu *ijab* (pernyataan pemberi saham), dan *qabul* (pernyataan penerima saham/pekerja).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: *'aqidyni* (kedua orang yang melakukan

¹⁷Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 203-205.

perjanjian), ma'qud 'alayh (saham/modal), dan sighat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).¹⁸

Rukun-rukun dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaku usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak perama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau'amil).

2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam

¹⁸ Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2017), hal.3

akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹⁹

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah.
- b. Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan..
- c. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas posentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 205-206

modal, seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat.

- d. *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.²⁰

5. Macam-macam *Mudharabah*

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dari lembaga keuangan syariah yang berladaskan konsep mudharabah. Namun, secara umum pembiayaan mudharabah dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad kerja sama di mana *mudharib* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan ataupun jenis usaha.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama dimana shahibul maal menetapkan syarat tertentu

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004), hal.218-219.

yang harus dipenuhi oleh mudharib baik mengenai tempat usaha, tujuan, maupun jenis usaha.²¹

Adapun jenis *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Al –Mudharabah Muqayyadah* on Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

- Teknik perbankan
- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh Bank, dan Bank wajib membuat akaq yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus idcantumkan dalam akad.

²¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal.210-211.

- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2. *Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana Bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.

- Teknik perbankan
 - a. Sebagai tanda bukti simpanan Bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi
 - b. Dana simoanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana.

- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dan dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²²

6. Asas-asas Perjanjian *Mudharabah*

Dari berbagai pustaka yang menguraikan mengenai *mudharabah*, kandungan atau syarat dari perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, mengingat ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, maka sebaiknya perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihdiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat.
2. Perjanjian *mudharabah* dapat pula dilangsungkan di antara beberapa shahib Al-mal dan beberapa *mudharib*.
3. Pada hakikatnya kewajiban utama *shahibul Al-mal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.

²² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal.60-61.

4. Yakin terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. *Shahibul Al-mal* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk membiayai suatu proyek atau suatu usaha. *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
6. *Shahibul Al-mal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
7. *Shahibul Al-mal* tidak dapat meminta jaminan dan *mudharib* atas pengambilan investasinya. persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *mudharabah* batal dan tidak berlaku.
8. *Mudharib* berkewajiban dana investasi kepada *shahibul Al-mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pengembaliannya telah ditentukan jumlahnya.
9. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama

mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.

10. *Shahibul Al-mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
11. Modal yang disyariatkan harus berbentuk Ung, jelas jumlahnya dan tunai.²³

7. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian produk pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas ke usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Utama Graffiti, 2007), hal.-30-36

5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁴

8. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya *mudharabah* menurut fuaha (ulama fikih) disebabkan beberapa hal:

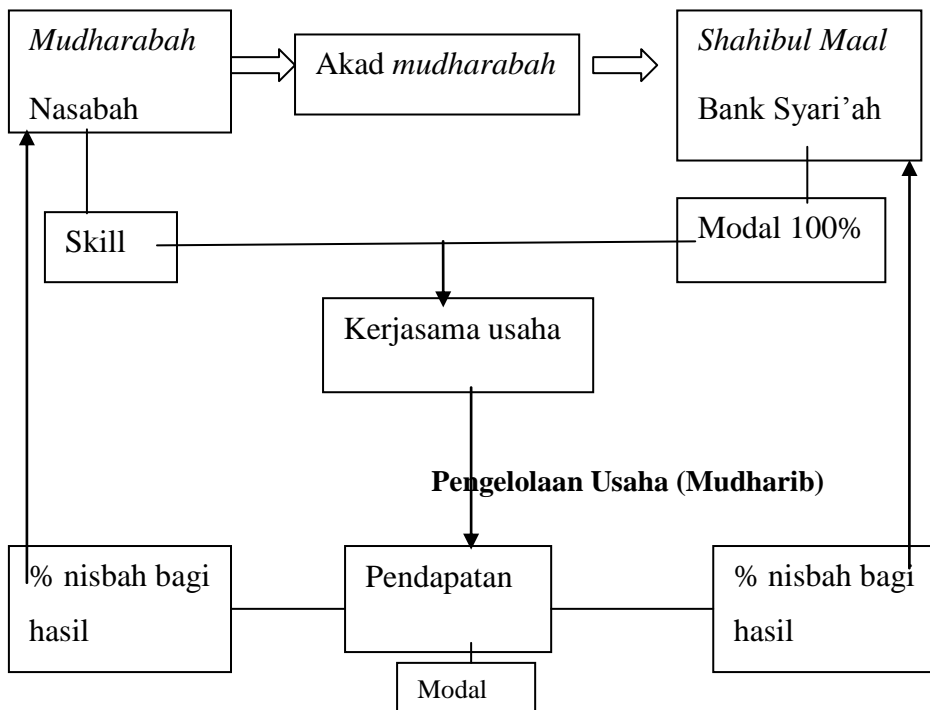
- a. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya.
- b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian *mudharabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama makiyah

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal.97-98.

berpendapat apabila yang melakukan perjanjian meninggal dunia maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya.²⁵

9. Pelaksanaan dan skema *Mudharabah*

Secara umum aplikasi akd *mudharabah* di lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Pr Rajagrafindo Persada, 2017), Hal. 7-8.

Keterangan:

- a. Bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan penngelolaan proyek (skill) yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh mudharib. Bank syariah tidak ikut campur dalam management perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- f. Presentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudhrib* maka akan semakin besar pendapatan bank syariah dan *mudharib*.²⁶

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) di kenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi

²⁶Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011) hal. 173-174.

diartikan pembagian laba. Secara deinitif profit sharing diartikan:”distribusi beberapa bagian dari laba dari suatu usaha.”²⁷

Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikannya adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelemparan dana pembiayaan (financing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil.²⁸

2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Beberapa sistem bagi hasil dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi dua sistem yaitu:

a. Profit sharing

²⁷Muhamad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN.2002), hal.107

²⁸ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.120

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan “pembagian laba”. Profit secara istilah adalah perbedaan lebih besar antara total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan dengan biaya total (total cost). Dalam istilah lain dari profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and Loss sharing, hal ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Apabila bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul mal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b. Revenue sharing

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan

atau pendapatan. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mal ikut menanggung kerugiannya. Contohnya sebagai berikut:²⁹

Bank Sakinah Syariah (BSS) melakukan kerja sama bisnis dengan Wahana, seorang pedagang menggunakan akad mudharabah. BSS memberikan modal

²⁹Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Yogyakarta: Hak Cipta, 2015), hal. 108-111

kepada Wahana sebesar Rp 10.000.000,00 dengan nisbah bagi hasil BSS: Wahana= 30% : 70% dengan profit sharing atau 10% : 90% apabila dengan revenue sharing. Wahana melaporkan laba rugi penjualannya sebagai berikut:

Penjualan	Rp 1.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	Rp (700.000,00)
Laba Kontor	Rp 300.000,00
Biaya-biaya	Rp (100.000,00)
Laba bersih	Rp 200.000,00

Pendapatan yang diperoleh BSS dan Wahana dari kerja sama bisnis atas pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode profit sharing atau revenue sharing.

Profit sharing

Bank Syariah : 30% x Rp 200.000,00 (laba kotor) =
Rp 60.000,00

Wahana : 70% x Rp 200.000,00 =
Rp 140.000,00

Revenue Sharing

Bank Syariah : 10% x Rp 300.000,00 =
Rp 30.000,00

Wahana : 90% x Rp 300.000,00 =
Rp 270.000,00

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS NU SEJAHTERA

A. PROFIL KSPPS NU SEJAHTERA

1. Sejarah Berdirinya KSPPS NU Sejahtera

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan faham Ahlussunah Wal Jama'ah. Tiga pilar tersebut adalah wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU XXX 37:1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme di bidang ini harus benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar belakang

tersebut, maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin /umat.¹

Berawal dari kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum Nahdliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada dilevel grass root (usaha mikro dan kecil).² Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk syari'ah (Baitul Mal Wa tamwil). Dengan adanya BMT akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah.

Apabila kita mengikuti perjalanan Nabi Muhamad SAW, maka kita dapat mengetahui bahwa kehidupan nabi dapat di bagi menjadi dua yaitu: sebagai nabi atau rosul dan yang kedua sebagai pedagang (ekonomi) .bahkan usia beliau

¹ RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016
Tanggal 14 Januari 2017 hal.5

² File dari KSPPS NU Sejahtera

yang digunakan sebagai pedagag lebih panjang disbanding sebagai rasul. Profesi sebagai pedagang ini lah yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dakwah Islamiah beliau. Menurut teori kebutuhan, bahwa kebutuhan biologis berupa tercukupinya makan dan minum merupakan kebutuhan pertama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan menurut “ hadist Rasulullah bahwa kemiskinan (tidak tercukupinya kebutuhan dasar makan, dan minum) akan mendekatkan manusia kepada kekafiran. Oleh karena itu membangun ekonomi rakyat merupakan persyaratan dalam melakukan dakwah islamiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlu melakukan/menggarap bidang ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan Nahdliyin/umat. Bahwasannya sejak bulan November 2001, lembaga perekonomian MWC NU Gunungati telah mengembangkan unit usaha depo minyak tanah. Maka melalui beberapa anggotanya, pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi nomor : 180.80/315 mendirikan koperasi “BUMI SEJAHTERAA”, di samping juni 2003 telah membuka unit usaha Toserba.³

³ RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016
Tanggal 14 Januari 2017 hal.6

Koperasi BUMI SEJAHTERA sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga perekonomian NU (LPNU) bertekad melakukan kegiatan usaha yang sepenuhnya berdasarkan syariat Islam selama mempunyai kemampuan dalam melaksanakannya. Pada tanggal 25 April 2008, berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Koperasi dan UKM kota No 180.08/PAD/XIV.34/02, koperasi “BUMI SEJAHTERA” beubah nama menjadi NU Sejahtera. Sebagai badan usaha koperasi, harus dikelola dengan baik seperti bentuk badan usaha lainnya. Disamping itu, sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional serta norm-norma dan kebiasaan yang lazim berlaku di dunia usaha. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat dalam tekanan kehidupan ekonomi. Oleh karenanya pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan kopersi NU Sejahter sudah ditingkat proinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.II/III/2009.

Seiring dengan perkembangan pasar dan adanya tuntutan dari anggota nahdliyyin pada khususnya dan anggota pada umumnya, maka pada tanggal 06 oktober 20014 mendapatkan pengesahan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bahwa yang semula bernama Koperasi NU Sejahtera menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nusa

Ummat Sejahtera dengan wilayah keanggotaan berkedudukan dan berdomisili di dalam Wilayah Republik Indonesia.⁴

BMT NU Sejahtera yang berpusat di kota Semarang didirikan pada tahun 2007 dengan akta Notaris Badan Hukum sebagai koperasi No. 180.08/305 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2007. Eksistensi BMT NU Kota Semarang merupakan Manifestasi dari hasil pemikiran kalangan nahdliyyin (NU) terkait masalah pengembangan ekonomi Islam. hal ini disebabkan banyaknya kalangan umat islam yang masih membutuhkan bantuan pengembangan usaha, khususnya yang masih dalam tingkat usaha kecil dan mikro. Menjamurnya berbagai keuangan mikro yang memiliki paket konsumen tersendiri di masyarakat membuat BMT NU Sejahtera pun berupaya menjadi competitor profesional mengusung visi Memberdayakan Perekonomian Warga Nahdliyyin semakin sukses dan sejahtera. Dalam KONFERCAB (Konferensi Cabang) NU tahun 2006, semua sepakat bahwa PCNU harus mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan koperasi oleh PCNU Semarang dengan nama Koperasi NU Sejahtera atau koperasi NUS. Langkah ini kemudian dikembangkan dan akhirnya pada tahun 2007 dibentuklah Bitul mal wal tamwil (BMT) dengan nama yang

⁴RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016
Tanggal 14 Januari 2017 hal.6-7

sama yakni BMT NU Sejahtera. Dalam penggunaan nama “Sejahtera” terkandung harapan dan sekaligus tujuan pendirian BMT. Harapan dan tujuan tersebut tidak lain adalah agar BMT NU Sejahtera mampu menjadi sarana warga Nahdhliyin pada khususnya maupun umat Islam pada umumnya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang harmonis, aman dan tepat guna.⁵

2. Tujuan, Visi Dan Misi Bmt Nu Sejahtera

Setiap organisasi atau perusahaan manapun pasti memiliki tujuan serta visi misi tersendiri, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki akan menuju perkembangan yang terarah. Begitupun dengan BMT NU Sejahtera mempunyai visi dan misi dalam menentukan perkembangan. Adapun yang menjadi visinya adalah:

“Menjadi Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat Yang Mandiri Dengan Landasan Syariah”.

Kemudian misi dari BMT NU Sejahtera ini adalah:

- a. Menjadi penyelenggara layanan keuangan syariah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.

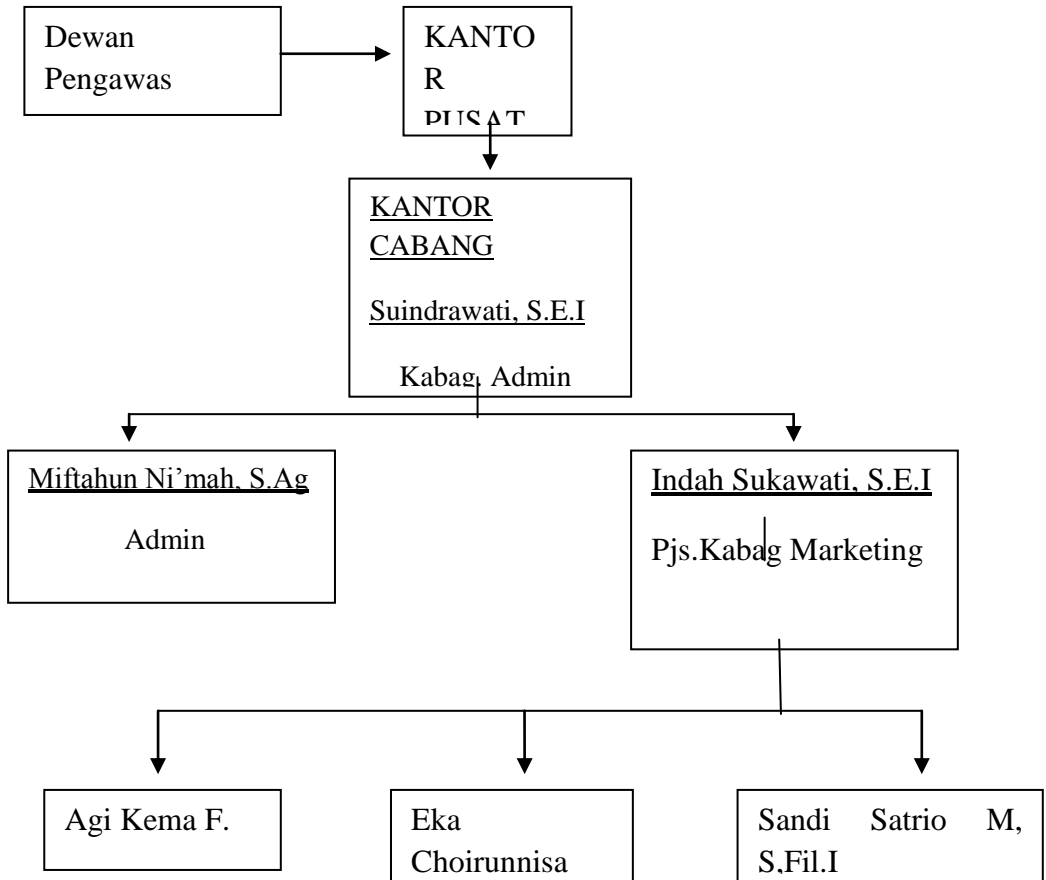
⁵<http://nusaummatsejahtera.wordpress.com/2013/05/21/baitul-mal-wa-tamwil-nu-sejahtera-semarang/> diakses pada 19 November 2018, pukul 13.52

- b. Menjadi model pengetahuan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan professional.
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi syariah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syariah.

Sedangkan tujuan dari KSPPS NU Sejahtera adalah:

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan adil.
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah.
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan KSPPS NU Sejahtera

3. Struktur Organisasi BMT Nu Sejahtera KC.Blora



**SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS DAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH KSPPS NUSA UMMAT
SEJAHTERA
PERIDE 2014/2018**

Pengurus :

Ketua	: DRS. H. MUHTAROM, Akt
Wakil ketua	: ABDULLAH
Sekretaris	: H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd,
S Mn, M. Pd	
Wakil sekretaris	: AGUSTIONO, SE
Bendahara	: H. ACHMAD KAFFI, SE

Pengawas:

Ketua	: DRS.H.ANASOM, M.HUM
Anggota	: Ir. H. BAMBANG HANGGORO
Anggota	: DRS. H. MUHDI ZAMRU, MAG

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: KH. HANIEF ISMAIL, LC
Anggota	:DRS. KH. AHMAD HADLOR IHSAN

4. Produk-Produk dan Jasa BMT Nu Sejahtera
 - I. Produk Simpanan Dana

Ada beberapa produk dan layanan yang dimiliki oleh BMT NU Sejahtera dalam hal penghimpunan dana atau simpanan dana, antara lain adalah:

- a. Simpanan *Wadi'ah* (dengan prinsip *wadi'ah yad dhamannah*)

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp.10.000 dan dapat disetor dan diambil setiap hari. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 2.4 %/ tahun. *Wadi'ah* bagi lembaga setara 3 % /tahun.⁶

Syarat dan ketentuan:

- a. Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000
 - b. Pengambilan sewaktu-waktu.
- b. Simpanan Pendidikan (dengan *prinsip wadi'ahh yad dhamannah*)

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah .

Bonus setara dengan 3% /tahun

Syarat dan ketentuan:

1. Setoran awal Rp.10.000
2. Mendapat buku SISUKSES GRATIS
3. Bila sudah terkumpul minimal Rp.5.000.000 atau lebih, dan tidak diambil selama 5 bulan berturut-turut akan mendapat bonus beasiswa untuk siswa

⁶ File dari KSPPS NU Sejahtera

0.5% dan 0,1% untuk pengelola dari saldo terakhir pada setiap bulannya.

c. Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan berjangka dalam kurun waktu 1,3,6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000 dan tingkat bagi hasil yang menguntungkan. ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu. Nisbah bagi hasil antara shahibul mal dan Mudharib = 60:40

1. Jangka waktu 1 bulan, bagi hasil setara dengan 0.3%/bulan.
2. Jangka waktu 3 bulan, bagi hasil setara dengan 0.5% /bulan
3. Jangka waktu 6 bulan, bagi hasil setara dengan 07% /bulan
4. Jangka waktu 12 bulan, bagi hasil setara dengan 1%/ bulan.

Syarat dan ketentuan:

1. Setoran minimal Rp. 1.000.000 dan atau kelipatannya.
2. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti setara dengan 5%.

3. Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening wadi'ah
 4. Diterbitkan buku bukti setor berupa warkah.⁷
- d. Simpanan Umroh dan Haji (dengan prinsip wadi'ah yad dhamnnah)

Simpanan yang ditujukan bagi ummat yang ingin menunaikan ibadah umrah dan haji bonus setara dengan 3%/tahun.

Syarat dan ketentuan.

1. setoran awal minimal dari Rp.100.000 dan dapat melakukan setoran setiap hari.
 2. Pengambilan setelah cukup untuk biaya haji dan umrah
 3. Fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik dan souvenir.
 4. Jama'ah bisa mengikuti bimbingan umrah dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.
- e. Simpanan pelunasan Haji (dengan prinsip *mudharabah*)

Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai Rp.10.000.000 sampai

⁷ File dari KSPPS NU Sejahtera

dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah.

Syarat dan ketentuan:

1. Setoran minimal Rp.1.000.000 /kelipatannya.
2. Nisbah menyesuaikan simka umum.
3. Bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik haji di KBIH. Bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila kurang calon jamaah haji dimohon tambahan.
4. Proses penyetoran pelunasan dibantu oleh KSPPS NU Sejahtera
5. Syarat-syarat mengisi formulir dilengkapi FC, KTP. BPIH buku tabungan Bank.
6. Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pelunasan haji.⁸

f. Simpanan qurban

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban bonus setara dengan 3% pertahun. Setoran awal mulai dari Rp.100.000. Setoran dapat dilakukan setiap hari, sedangkan pengambilan hanya dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban. Pembelian hewan qurban bisa dibantu oleh KSPPS BMT NU Sejahtera.

⁸ File dari KSPPS NU Sejahtera

- g. Simpanan pensiunan (dengan prinsip *mudharabah*)
Ketentuannya:
 - 1. Atas nama perorangan.
 - 2. Pembayaran setiap bulan sesuai akad.
 - 3. Apabila terjadi keterlambatan otomatis dianggap berhenti dan tidak mendapatkan bagi hasil.
 - 4. Lama jangka waktu 5 dan 10 tahun.
 - 5. Bagi hasil menyesuaikan masa jangka waktu.
 - 6. Minimal setoran mulai Rp. 50.000/ bulan
- h. Penyertaan Modal dan Saham
Syarat dan ketentuan.
 - 1. Setoran minimal Rp. 1.000.000 atau kelipatannya
 - 2. Jangka waktu 1 tahun
 - 3. Pengambilan bagi hasil sesudah RAT (bulan januari) dann pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil.
 - 4. Besaran bagi hasil berdasarkan tahun lalu mencapai 24% per tahun.
- i. Loker pembayaran Tagihan PLN, Telkom, dan Pulsa
Telepon Seluler, KPR (kredit kepemilikan rumah)
- j. Zakat, infaq dan shadaqah
Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mngelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

II. Produk Penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, antara lain:

a. Mudharabah

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mikro BMT NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara BMT dan mitra kerja sesuai kesepakatan.

b. Murabahah

Berdasarkan asas jual-beli, BMT sebagai penjual nasabah sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

5. Kegiatan BMT NU Sejahtera

Kegiatan yang dilakukan BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Usaha

- 1) Menerima simpanan anggota dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah.
- 2) Memberi pembiayaan kegiatan usaha ekonomi (produktif)

⁹ File dari BMT NU Sejahtera

- 3) Menerima titipan dan mengelola pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah menurut ketentuan syariah.
- b. Kegiatan usaha
- 1) Mendidik anggota untuk menyimpan/ menabung dengan menyediakan pelayanan simpanan anggota.
 - 2) Memberikan pembiayaan pengembangan usaha.
 - 3) Membimbing anggota dalam perencanaan dan pengembangan usaha.
 - 4) Membimbing anggota dalam pemanfaatan pembiayaan.
 - 5) Menyediakan sarana produksi.
 - 6) Memberikan latihan manajemen usaha maupun latihan teknis usaha.
 - 7) Memberikan pembinaan rohani dan pengkajian keislaman bagi seluruh anggota.
- c. Pengelolaan
- 1) Dikelola secara professional.
 - 2) Mengutamakan jaminan usaha/ sosial/lingkungan/tokoh masyarakat setempat, dari pada jaminan uang harta atau benda.

6. Asas dan Prinsip Dasar BMT NU Sejahtera

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT, adalah:

- a. Ahsan, (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam.
- b. Barokah, artinya berdayagunaan, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan, (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

B. Aplikasi Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Akad *Mudharabah* di BMT NU Sejahtera Cabang Blora

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah guna untuk memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya masyarakat pun juga membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal usaha ataupun yang lainnya.

Transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU Sejahtera lebih sering digunakan untuk pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Akan tetapi setelah nasabah mengajukan pembiayaan BMT tidak ikut campur dalam urusan usaha. Entah itu dipakai untuk hal produktif maupun konsumtif. BMT hanya sebagai penyedia modal untuk mempermudah nasabah mendapatkan pinjaman. Dalam prakteknya BMT tidak menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan yang didapat nasabah sebagai kelebihan modal akan tetapi dalam akad *mudharabah* ini keuntungan diambil dari dana pinjaman yaitu, 1,4% tergantung keputusan dari pusat, dikarenakan untuk menghindari resiko, dan dengan bagi hasil yang rendah diharapkan banyak yang meminjam di KSPPS NU Sejahtera. Dalam akad *mudharabah* kalau sistem

bagi hasil diambil keuntungan terkadang nasabah tidak berbuat jujur. Misalnya keuntungan yang di dapat banyak ngakunya sedikit, jadi lebih gampang menggunakan hitungan seperti itu. Karena yang dicari nasabah adalah bunga yang sedikit. Yang terpenting bagi KSPPS adalah nasabah rutin membayar angsuran.¹⁰

Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak KSPPS sebagai pihak pertama sebagai pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Awalnya dalam proses penandatanganan perjanjian KSPPS BMTNU Sejahtera menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh KSPP BMT NU Sejahtera.¹¹

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang telah ditentukan oleh BMT NU Sejahtera Blora.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora adalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan teller BMT NU Sejahtera KC.Blora tanggal 27 november

¹¹ Wawancara dengan Indah Sukawati selaku Manager dan PJS BMT NU Sejahtera KC.Blora tanggal 27 november 2018

1. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi pembiayaan atau bagian marketing mendatangi langsung ke anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/ anggota untuk mendapatkan pembiayaan.
3. Bagian marketing melakukan survei atau penilaian terhadap pengajuan pembiayaan ke nasabah.
4. Setelah pengajuan pembiayaan masuk pihak KSPPS BMT NU Sejahtera melakukan penilaian ulang terhadap berkas yang masuk. Jika permohonan pengajuan pembiayaan diterima melalui keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya pihak KSPPS BMT NU Sejahtera memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
5. Dalam proses akad ini terjadi tawar menawar antara KSPPS BMT dan anggota/nasabah untuk pembagian penentuan margin bagi hasil, akan tetapi di KSPPS BMT NU Sejahtera sudah ada prosedur sendiri untuk perolehan margin bagi hasil tersebut. Adapun untuk anggota yang pertama kali melakukan pembiayaan tidak boleh menawar seberapa besar bagi hasil yang diinginkan, anggota harus mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan BMT. Tetapi setelah pembiayaan kedua nasabah/ anggota boleh melakukan tawar menawar jika

margin bagi hasil yang diberikan pihak BMT terlalu besar. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penentuan besarnya bagi hasil, maka proses selanjutnya selanjutnya adalah.

6. Penandatanganan kontrak, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasabah. Setelah selesai tandatangan kontrak selanjutnya adalah.
7. Pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk potongan biaya administrasi.¹²

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

1. Mengisi formulir pembiayaan.
2. Foto copy KTP suami dan isteri
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Foto copy jaminan (warkah, BPKB disertai STNK. Sertifikat tanah disertai SPPT. Jika barang jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemegang hak.
6. Foto copy Legalitas (bagi badan usaha)
7. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan
8. Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

¹²Wawancara dengan Bapak Sakdullah, pengurus BMT NU Sejahtera Pusat Semarang.

Apabila nasabah telat membayar 1-2 bulan dikenakan SP 1, apabila dalam waktu seminggu belum melunasi juga maka akan dikenakan SP 2, apabila telat lagi akan dikenakan SP 3, dan apabila sudah tidak bisa di bicarakan baik-baik maka akan dilakukan tarik jaminan. Jaminan akan ditarik oleh BMT dan akan dijual yang nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah, dan apabila uang dari hasil penjualan lebih setelah dikurangi seluruh hutang dan denda maka akan dikembalikan kepada nasabah. Denda yang ditetapkan oleh BMT kepada nasabah yang menunggak akan dikenakan denda $0.25\% \times \text{angsuran} \times \text{perhari}$.¹³

Pada tanggal 23 April 2018 saudara Ali Makmun mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4.500.000, dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 buln, dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

Plafon	:	Rp.4.500.000
Margin keuntungan	:	Rp.756.000
Biaya		
Biaya administrasi	: 2%	Rp.90.000
Biaya Akad	: 1%	Rp. 45.000
Materai	: 3	Rp. 18.000

¹³Wawancara dengan Miftahun Ni'mah (admin BMT NU Sejahtera) tanggal 26 november 2018

¹⁴ Surat perjanjian Al- Mudharabah

Setoran yang harus dibayar setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

Bagi hasil $1.4 \% \times \text{Rp.}4.500.000 = \text{Rp.}63.000$
(angsuran pokok)

Jangka waktu $\text{Rp.} 4.500.000 : 12 = \underline{\text{Rp.} 375.000} + (\text{angsuran Mark up})$

$\text{Rp.} 438.000 / \text{bulan}$

Adapun rincian Angsuran yang Harus dipenuhi:¹⁵

Nama Debi/tur : ALI MAKMUN

Alamat : BOGOREJO,
DUNGGLONGGONG 003/003, KAB. BLORA

Tanggal pembiayaan : 25 April 2018

Jangka waktu : 12 Bulan

Plavon : $\text{Rp.} 4.500./000,-$

Margin : $1,4\% / \text{bln}$

No.Rek Kredit : 05617.00201

Jatuh Tempo : 25 April 2019

¹⁵ Buku angsuran nasabah

Angsuran pokok	: Rp.375.000
Bagi hasil	: Rp.63.000
Angsuran	: Rp. 438.000
Total Administrasi	: Rp. 78.000,-

Setiap keterlambatan bayar dikenakan denda sebesar 0,25% per hari dari jumlah Angsuran. Total angsuran yang harus dibayarkan nasabah sebesar Rp. 438.000 / bulan. Didapat dari angsuran pokok di tambah dengan mark up yang sudah ditetapkan oleh BMT. Nasabah berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap bulan, apabila nasabah telat membayar maka akan di kenakan SP.¹⁶

Pada tanggal 10 september 2018 Bapak Djasmuri mengajukan pembiayaan untuk tambah modal usaha sebesar Rp.8.000.000, akan tetapi setelah dilakukan survey pembiayaan yang disetujui oleh pihak BMT sebesar Rp.7.000.000. Pinjaman yang diterima tentu tidak utuh sesuai dengan

¹⁶Wawancara dengan nasabah (Ali makmun), pada tanggal 28 november 2018

pembiayaan tetapi dikurangi dengan biaya-biaya selama akad.¹⁷ Adapun rinciannya sebagai berikut:¹⁸

Plafon : Rp. 7.000.000

Margin keuntungan : Rp. 2.352.000 +

Jumlah Rp. 9.352.000

Biaya:

Biaya Administrasi : 2.5% Rp.175.000

Biaya akad : 1% Rp. 70.000

Materai : 3 Rp. 12.000

Angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan:

Angsuran pokok: Rp.7.000.000: 24 bulan =
Rp.291.667

Mark Up 1.4%: 1.4% x7.000.000 = Rp. 98.000

JUMLAH = Rp. 389.667

Adapun rincian Angsuran yang Harus di Penuhi:¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan nasabah (Djasmuri) pada tanggal 27 November 2018

¹⁸ Surat perjanjian Al- Mudharabah

Nama Debitur : DJASMURI

Alamat : Dk.SARIMULYO 008/002,
NGAWEN, BLORA

Tanggal pembiayaan : 20 September 2018

Jangka waktu : 24 Bulan

Plavon : Rp. 7.000.000,-

Margin : 1,4% / bln

No.Rek Kredit : 05617.00228

Jatuh Tempo : 20 Septeber 2020

Angsuran pokok : Rp.291.667

Bagi hasil : Rp.98.000

Angsuran : Rp. 389.667

Total Administrasi : Rp. 257.000,-

Jadi total angsuran yang harus dibayar nasabah adalah angsuran pokok ditambah mark up. Nasabah wajib membayar setoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁹ Buku angsuran nasabah

Pada tanggal 13 september 2018 Bapak Nur Solikin mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk biaya persalinan istrinya sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu selama 10 bulan.²⁰ Dengan rincian sebagai berikut:

Plafon : Rp. 2.000.000

Margin keuntungan : RP. 250.000 +

Rp. 2.250.000

Biaya:

Biaya administrasi : 2% Rp. 40.000

Biaya Akad : 1 % Rp. 20.000

Materai : 3 Rp. 18.000.²¹

Angsuran yang harus dibayarkan per bulan dengan rincian sebagai berikut:

Bagi hasil (Mark Up) :

$Rp.2.000.000 \times 1.25\% = Rp.25.000$

Jangka waktu : Rp.2.000.000: 10 bulan = Rp. 200.000 +(angsuran pokok)

²⁰ Wawancara dengan nasabah (Nur Solikin) pada tanggal 29 November 2018.

²¹ Surat perjanjian Al- Mudharabah

Rp.

225.000

Adapun rincian Angsuran yang Harus di Penuhi:²²

Nama Debitur : Nur Solikin

Alamat : Dk. Ngablak 007/004,
Kel.Sumberagung, Kec.Banjarejo,

Kab.BLORA

Tanggal pembiayaan : 14 September 2018

Jangka waktu : 10 Bulan

Plavon : Rp. 2.000.000,-

Margin : 1,25% / bln

No.Rek Kredit : 05617.00303

Jatuh Tempo : 14 Juli 2019

Angsuran pokok : Rp.200.000

Bagi hasil : Rp.25.000

Angsuran : Rp. 225.000

²² Buku angsuran nasabah

Total Administrasi : Rp. 78.000,-

Total angsuran yang harus dibayarkan nasabah setiap bulan adalah angsuran pokok ditambah Mark Up. Bagi hasil yang didapat berbeda dengan saudara Ali Makmun karena Isteri Bapak Nur Solikin adalah karyawan BMT, sesuai dengan kebijakan BMT keluarga karyawan akan mendapat potongan apabila mengajukan pembiayaan. Nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 225.000 per bulan selama 10 bulan. Apabila nasabah lalai dalam membayar akan dikenakan denda yaitu sebesar $0.25\% \times \text{angsuran} \times \text{hari keterlambatan}$.

Pada tanggal 15 oktober 2018 ibu Siti Sri Rejeki mengajukan pembiayaan di BMT NU Sejahtera cabang Blora sebesar Rp. 6.000.000 untuk keperluan tambahan modal dan yang lainnya, dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor.²³ Dan sesuai dengan perjanjian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara di angsur selama 12 bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:²⁴

Plafon : Rp.6.000.000

Margin keuntungan : Rp.1.008.000+

2018 ²³ Wawancara dengan Ibu Siti Sri Rejeki pada tanggal 2 Desember

²⁴ Surat perjanjian Al- Mudharabah

Jumlah : Rp. 7.008.000

Biaya-biaya:

Biaya administrasi 2% : Rp. 120.000

Biaya Akad 1% : Rp. 60.000

Biaya Materai 2 : Rp. 12.000 +

Rp. 192.000

Rincian angsuran yang harus di bayarkan perbulan.

Jangka waktu 12 bulan: Rp.6.000.000: 12 bulan =
Rp. 500.000

Bagi hasil (mark up) 1,4% = 1.4% x Rp.6.000.000 =

Rp. 84.000 +

Rp. 584.000

Adapun rincian Angsuran yang Harus di Penuhi:²⁵

Nama Debitur : SITI SRI REJEKI

Alamat : Ds. Punggursugih, 005/002,

Kec. Ngawen, Kab. Blora.

²⁵ Buku angsuran nasabah

Tanggal pembiayaan : 1 November 2018

Jangka waktu : 12 Bulan

Plavon : Rp. 6.000.000,-

Margin : 1,4% / bln

No.Rek Kredit : 05690039

Jatuh Tempo : 1 November 2019

Angsuran pokok : Rp.500.000

Bagi hasil : Rp.84.000

Angsuran per bulan : Rp. 584.000

Total Administrasi : Rp. 192.000,-

Jadi ibu Siti Sri Rejeki menerima pinjaman sebesar Rp. 6.000.000 setelah dikurangi biaya administrasi Ibu Hartini menerima uang sebesar Rp. 5.905.000. Setiap bulan Ibu Hartini harus mengangsur sebesar Rp. 584.000.

Pada tanggal 22 Oktober 2018 Ibu SUNANI menerima pinjaman dari BMT NU Sejahtera sebesar Rp. 3.000.000 guna untuk keperluan tambahan modal usaha dan keperluan lainnya. Sesuai dengan perjanjian Ibu SUNANI harus mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp.

3.504.00 dan mengangsur pinjaman tersebut selama 12 bulan.²⁶ Dengan rincian sebagai berikut:

Plafon : Rp. 3.000.000

Margin keuntungan : Rp. 504.000 +

Jumlah : Rp. 3.504.000

Biaya-biaya

Biaya Administrasi 2% : Rp. 60.000

Biaya Akad 1% : Rp. 30.000

Materai 2 : Rp. 12.000 +

Jumlah : Rp. 102.000.²⁷

Angsuran yang harus di bayarkan.

Angsuran pokok = Rp. 3.000.000: 12 bulan= Rp. 250.000

Bagi hasil (mark up) = Rp. 3.000.000x 1.4 %= Rp. 42.000 +

²⁶ Wawancara dengan Ibu SUNANI pada tanggal 2 Desember 2018

²⁷ Surat perjanjian Al- Mudharabah

Rp. 292.000

Adapun rincian Angsuran yang Harus di Penuhi:²⁸

Nama Debitur : SUNANI
 Alamat : Ds. Trembulrejo, 002/002
 Trembulrejo, Kec. Ngawen,
 Kab. BLORA

Tanggal pembiayaan : 1 November 2018

Jangka waktu : 12 Bulan

Plavon : Rp. 3.000.000,-

Margin : 1,4% / bln

No.Rek Kredit : 05617.00303

Jatuh Tempo : 1 November 2019

Angsuran pokok : Rp.250.000

Bagi hasil : Rp.42.000

Angsuran per bulan : Rp. 292.000

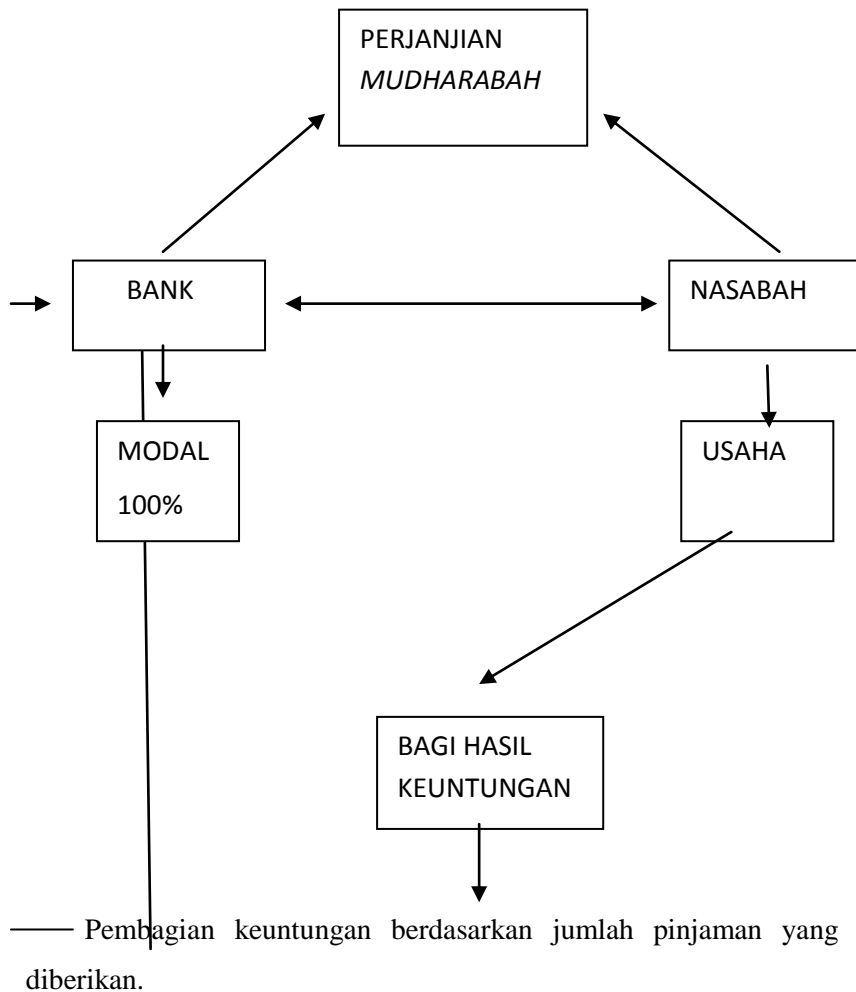
²⁸ Buku angsuran nasabah

Total Administrasi : Rp. 102.000,-

Jadi ibu SUNANI harus membayar angsuran sebesar Rp. 292.000 selama jangka waktu 12 bulan.

Dari wawancara dengan nasabah di atas dapat di jelaskan bahwa akad yang di pakai dalam pembiayaan adalah akad *mudharabah* dengan objek akad yang di gunakan adalah uang sebagai dana pembiayaan. Kemudian dalam wawancara penulis dari keterangan kelima nasabah tersebut bahwa mayoritas nasabah kurang mengetahui jenis pembiayaan apa yang di gunakan. Yang mereka ketahui hanya meminjam uang dengan menggunakan barang atau benda yang di jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut tanpa mengetahui akad yang di gunakannya dalam meminjam uang di KSPPS NU Sejahtera. Mereka mengetahui bahwa akad yang dipakai itu adalah akad *mudharabah* setelah dapat surat perjanjian. Dalam hal ini yang terpenting bagi KSPPS adalah nasabah rutin dalam pembayaran dan yang terpenting bagi nasabah adalah bunga yang ditetapkan ringan.

Skema keuntungan bagi hasil *mudharabah* di BMT
NU Sejahtera;



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah meminjam kepada bank dan mengadakan perjanjian

sesuai kesepakatan, kemudian nasabah memberikan bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan bagi hasil ini di ambil bukan dari keuntungan yang didapat nasabah tetapi diambil dari besar jumlahnya pinjaman yang diterima.

BAB IV
ANALISI PRAKTEK BAGI HASIL DALAM AKAD
MUDHARABAH

A. Analisis Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Akad *Mudharabah* di BMT NU Sejahtera Cabang Blora Menurut Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah guna untuk memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya masyarakat pun juga membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan baik untuk modal usaha ataupun yang lainnya.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan pembiayaan dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Fatwa DSN DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa rukun dan syarat pembiayaan, pertama penyediaan dan pengelola harus cakap hukum. Kedua pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak. Ketiga, modal adalah sejumlah uang atau atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, modal tidak dapat berbentuk piutang. Ke empat keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Ke lima kegiatan usaha oleh pengelola.¹

BMT NU Sejahtera didirikan berawal dari kondisi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang lesu, maka kaum Nahdliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada dilevel grass root (usaha mikro dan kecil). Untuk mengembangkan ekonomi

¹ Himpunan Fatwa DSN MUI DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah hal,77-83

menengah kebawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk syari'ah (Baitul Mal Wa tamwil). Dengan adanya BMT akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah kebawah.

Transaksi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora lebih sering digunakan untuk pembiayaan sebagai tambahan modal kerja. Akan tetapi setelah nasabah mengajukan pembiayaan BMT tidak ikut campur dalam urusan usaha. Entah itu dipakai untuk hal produktif maupun konsumtif. BMT hanya sebagai penyedia modal. Dalam prakteknya BMT tidak menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan yang didapat nasabah sebagai kelebihan modal akan tetapi dalam akad *mudharabah* ini keuntungan diambil dari dana pinjaman yaitu, 1.4% tergantung keputusan dari kantor pusat, karena dalam akad mudharabah kalau sistem bagi hasil diambil keuntungan terkadang nasabah tidak berbuat jujur. Misalnya keuntungan yang di dapat banyak ngakunya sedikit, jadi lebih gampang menggunakan hitungan seperti itu. Karena yang dicari nasabah adalah bunga yang sedikit. Dan untuk menghindari keurangann.

Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah* dilakukan oleh dua orang, dimana pihak BMT sebagai pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul Mal) dan pihak

kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Awalnya dalam proses penandatanganan perjanjian KSPPS BMT NU Sejahtera menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh BMT. Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Blora dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Blora.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT NU Sejahtera cabang Blora adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke kantor KSPPS BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi pembiayaan atau bagian marketing mendatangi langsung ke anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/ anggota untuk mendapatkan pembiayaan.
3. Bagian marketing melakukan survei atau penilaian terhadap pengajuan pembiayaan ke nasabah
4. Setelah pengajuan pembiayaan masuk pihak KSPPS BMT NU Sejahtera melakukan penilaian ulang terhadap berkas yang masuk. Jika permohonan pengajuan pembiayaan diterima melalui keputusan komite pembiayaan
5. Selanjutnya pihak KSPPS BMT NU Sejahtera memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa permohonan

pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad. Di sini ketika anggota melakukan akad terjadi proses tawar menawar untuk menetapkan berapa bagi hasil yang diperoleh. Akan tetapi anggota boleh menawar ketika sudah melakukan pembiayaan kedua, kalau baru pertama kali mengajukan pembiayaan anggota tidak boleh menawar bagi hasil yang sudah ditentukan.

6. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk potongan biaya administrasi.²

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah transaksi atau kerjasama Dana dalam akad tersebut termaktub segala ketentuan, kebijakan, dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi atau bekerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora.

²Wawancara dengan suindrawati admin BMT NU Sejahtera tanggal 26 november 2018

Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan, tahap pertama, pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah. Tahap kedua, setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga, BMT melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalittan data nasabah. Tahap keempat, BMT melakukan analisis pembiayaan untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Tahap kelima menginformasikan kepada nasabah bahwa pembiayaan disetujui. Tahap keenam BMT melakukan penjelasan serta perjanjian dan penentuan bagi hasil dan angsuran yang harus dibayarkan. Adapun perhitungan bagi hasil akad mudharabah sebagai berikut:

Misalnya nasabah A meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan margin 1,4% dan diangsur dalam jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasil:

Jangka waktu = $\text{Rp.6.000.000} : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 500.000$

Bagi hasil = $\text{Rp.6.000.000} : \times 1.4\% = \text{Rp.84.000}$

Jadi angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan adalah bagi hasil + dengan jangka waktu = $\text{Rp.}84.000 + \text{Rp.}500.000 = \text{Rp.}584.000$

Keuntungan yang didapat BMT bisa diketahui dengan menjumlahkan angsuran perbulan X jangka waktu –plafon pembiayaan= $\text{Rp.}584.000 \times 12 - \text{Rp.}6.000.000 = \text{Rp.}1.008.000$. jadi keuntungan yang diperoleh oleh BMT adalah $\text{Rp.}1.008.000$. jika dijumlahkan keseluruhan nasabah harus mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah plafon+ dengan bagi hasil = $\text{Rp.}6.000.000 + \text{Rp.}108.000 = \text{Rp.}7.008.000$.

Setelah melakukan perjanjian kontrak dan penjelasan bagi hasil yang harus di penuhi oleh nasabah selanjutnya adalah proses pencairan dana.

Penyerahan dana dalam pembiayaan ini dilakukan langsung setelah terjadi akad. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penyerahan dana dalam pembiayaan yaitu KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan, kemudian dilihat juga kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran serta bukti yang dijadikan sebagai jaminan. Jadi modal atau dana dalam pembiayaan ini diketahui jumlah dan jenis mata uangnya serta diberikan secara tunai. Akan tetapi untuk usaha nasabah pihak

BMT sendiri tidak mementingkan tujuan dilakukan pembiayaan ini diperlukan sebagai tambahan modal atau tidak. Pada teori *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* digunakan sebagai usaha yang keuntungannya akan dibagi untuk kedua belah secara proporsional dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Akan tetapi yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora keuntungan di ambil bukan dari keuntungan yang didapat dari usaha nasabah melainkan dari pinjaman, semakin besar plafon pembiayaan maka semakin besar pula pinjaman yang dikembalikan, sama halnya dengan Bank-bank konvensional.

Dalam nisbah keuntungan produk pembiayaan dilakukan atas dasar profit sharing artinya perhitungan harus saling menguntungkan baik pihak BMT atau nasabah, namun kondisi masyarakat saat ini pemberlakuan sistem pembiayaan *mudharabah* sulit untuk diterapkan, karena masyarakat sendiri belum mau untuk menerapkannya berdasarkan standar Dewan Syariah Nasional, jadi perhitungan bagi hasil di ambil dari modal pinjaman bukan dari hasil keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kelima anggota dan karyawan KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora dapat di jelaskan bahwa akad yang di pakai dalam pembiayaan adalah akad *mudharabah* dengan objek akad yang di gunakan adalah uang sebagai dana pembiayaan.

Mudharabah adalah akad kerja sama dua orang yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* ini harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun *mudharabah* meliputi: pemilik modal, pengelola modal, modal, pekerjaan (proyek)/ kegiatan usaha, nisbah keuntungan serta akad ijab qabul. Sedangkan syaratnya yaitu pertama, *shahibul mal* dan *mudharib* harus cakap dan sah menurut hukum, kedua, modal diketahui jumlah dan jenis mata uangnya serta tunai. Ketiga, nisbah keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak. Keempat, akad harus menunjukkan tujuan kontrak baik secara eksplisit maupun implisit serta semua pihak setuju atas ketentuan ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis.

Mayoritas nasabah kurang mengetahui jenis pembiayaan apa yang di gunakan, yang mereka ketahui adalah meminjam uang dengan menggunakan barang atau benda yang di jadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut tanpa mengetahui akad yang di gunakannya dalam meminjam uang di KSPPS BMT NU Sejahtera. Mereka mengetahui bahwa akad yang dipakai itu adalah akad *mudharabah* setelah dapat surat perjanjian dan dijelaskan oleh

BMT, mereka juga tidak mengetahui teori *mudharabah* yang sesungguhnya seperti apa, bagi para nasabah antara BMT dan bank-bank lainnya itu sama, sama-sama ada bungannya. Yang di cari para nasabah adalah bank yang bunganya rendah atau sedikit, menurut nasabah dalam hal ini itu saling menguntungkan dikarenakan ketika nasabah butuh uang nasabah tinggal datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, setelah melalui beberapa tahapan nasabah menerima pinjaman dengan syarat ada jaminan. Semakin plafon pembiayaan lebih besar maka jumlah pinjaman yang dikembalikan lebih besar juga.

Berdasarkan praktek bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera itu belum sesuai dengan Fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan pembiayaan *mudharabah* nisbah bagi hasil harus di peruntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Apabila ditinjau dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Rukun pembiayaan mudharabah Pasal 1 ayat

pertama *Shahibul maal*/ (pemilik dana/ nasabah harus cakap hukum). Ke dua Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ke tiga Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib. Ke empat Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari moda. Ke lima Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib).³

Dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata ada kesenjangan praktik yang ada dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera. Jadi menurut analisa penulis mengenai praktek bagi hasil dalam akad *mudharabah* oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora, menurut hukum islam tidak sesuai karena dilihat dari segi rukun akad serta syarat yang terkait terhadap Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 Poin 4 a dan b telah dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus di peruntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

³ Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan BMT hanya menanyakan berapa jumlah pinjaman yang di minta kemudian dihitung berapa pinjaman yang harus dikembalikan dan mau diangsur selama berapa bulan. Dari pihak BMT juga tidak menjelaskan secara detail mengenai konsep bagi hasil yang sesuai syariah dan pada umumnya masyarakat tidak atau kurang paham adanya pembiayaan mudharabah, yang terpenting bagi nasabah, nasabah mendapatkan pinjaman dengan mudah. Dan nasabah sanggup untuk melunasinya.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Akad Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya KSPPS BMT NU Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Dengan prinsip ini KSPPS BMT NU Sejahtera berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dengan demikian KSPPS BMT NU Sejahtera mengajak dan menciptakan masyarakat untuk melakukan kerja sama ekonomi yang berdasarkan syariah.

Dalam Islam pemenuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, tetapi merupakan pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan materi tersebut manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kerja sama lainnya.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola modal untuk diperdagangkan di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan keuntungan di ambil dari hasil keuntungan usaha.

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.⁴

Demikian pula pada KSPPS BMT NU Sejahtera yang menerapkan prinsip bagi hasil ke dalam salah satu produk pembiayaannya.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hal.111-113

Sistem perhitungan pada pembiayaan *mudharabah* adalah return (perolehan kembalinya) dari investasi nasabah. Besar kecilnya perolehan kembalinya tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Mekanisme dana yang digunakan untuk pembiayaan, didapatkan dari dana tabungan nasabah dan dikumpulkan menjadi satu produk dengan produk lain untuk dikelola. Dalam salah satu produk penyaluran dana KSPPS BMT NU Sejahtera menggunakan sistem *mudharabah*. Melihat prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dipraktikkan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora, maka dapat diketahui secara rinci apakah praktek perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hal ini dapat dilihat akad dan cara perhitungan bagi hasil, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* yaitu:⁵

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaku usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*).

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 205-206

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera disyaratkan harus wajib memiliki KTP, artinya anggota harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, management skill, dan lain-lain. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera untuk syarat modal yaitu modal harus berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang) dan diserahkan kepada anggota (*mudharib*), akan tetapi, besar modal yang diberikan belum memenuhi kriteria 100%. Karena di KSPPS BMT NU Sejahtera modal yang diberikan tidak hanya untuk tambahan modal usaha tapi untuk hal lainnya seperti biaya persalinan, biaya sekolah anak. Pelaksanaan

pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera terkait dengan kegiatan usaha sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu hak usaha sepenuhnya diserahkan kepada mudharib, ketika modal usaha sudah dicairkan maka kan diserahkan kepada mudharib mau digunakan untuk kegiatan usaha apa saja sesuai yang diinginkan mudharib. Akan tetapi mengenai pengawasan dari *shahibul mal* belum terlaksana dengan baik. Sampai saat ini pihak dari KSPPS BMT NU Sejahtera tidak melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilaksanakan mudharib.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela).⁶ Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pelaksanaan ijab dan qabul di KSPPS BMT NU Sejahtera ini dilakukan secara tertulis dan disepakati ditunjukkan dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari segi *shighat*, menurut penulis belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam akad *shighat* ijab qabulnya pihak bank tidak menjelaskan secara rinci apa itu pembiayaan *mudharabah*, bagaimana cara nasabah mendapatkan keuntungan dari pembiayaan ini

⁶ Dimyauuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, 2015), hal.227

dan lain sebagainya, nasabah yang awam yang tidak mengetahui pembiayaan mudharabah akan merasa dirugikan jika pada akhirnya keuntungan yang didapatkan sedikit.

Dalam hukum Islam perlu adanya catatan untuk pemahaman, dengan Firman Allah QS. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambi) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

d. Nisbah keuntungan.

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah sesuai perjanjian yang telah disepakati.⁷

Pembiayaan mudharabh di KSPPS BMT NU Sejahtera dalam penentuan bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT NU Sejahtera yaitu sebesar 1,4% dari

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*,...Hal. 205-206

pokok pembiayaan ditambah dengan pokok pinjaman dibagi dengan jangka waktu, dan kerugian usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi *mudharib*. Jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan sesuai dengan plafonnya, yaitu: $\text{bagi hasil} = 2\% \times \text{pokok pembiayaan} + \text{pokok pembiayaan} : \text{jangka waktu}$. Jumlah bagi hasil yang diberikan *mudharib* selalu sama tidak berubah-ubah. Dari segi pekerjaan dimana bank bertindak sebagai *mudharib* adalah bertugas mengolah dana dari nasabah, sedangkan nasabah adalah sebagai penyedia dana, keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* ini belum sesuai dengan hukum Islam, pasalnya dalam praktik transaksinya pihak *mudharib* tidak menyertakan berapa keuntungan yang akan diperoleh nasabah, sedangkan dalam peraturannya ketika transaksi berlangsung semua yang berkaitan dengan pembiayaan harus dijelaskan ketika akad, sehingga tidak akan ada unsur *ghoror*.

Pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera ini lebih ditekankan pada masyarakat sekitar yang sebagian penduduknya bermata pencaharian petani dan berdagang. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera diharapkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal usaha.

Islam telah mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang orang mempunyai harta, tetapi tidak mampu memproduksi hartanya. Pada sisi lain, ada juga orang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan mengelola harta. Oleh karena itu, syariat Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapat manfaat. Adapun syarat yang harus di penuhi yaitu:

1. Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah.

Ibnu Munsdzir mengatakan:” Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga ppraktek *mudharabah* bahwa seorang tidak boleh menjadikan piutang untuk *mudharabah* (sebagai modal).”

Dalam hal ini modal yang di berikan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera sesuai dengan syariat Islam. karena modal yang diberikan dalam bentuk tunai bukan piutang.

2. Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas posentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat.

Dan Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi hasil. Ibnu Munzir berkata: “ Semua sepakat bahwa *qiradh* batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan bagi hasil dengan jumlah dirham yang telah ditentukan. Sebab hukumnya, andaikan disyaratkan nominal tertentu untuk salah satu pihak, maka keuntungan hanya akan terbatas pada jumlah tersebut sehingga pihak lain bisa tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menyalahi akad *mudharabah* yang bertujuan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp.10.000.000, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah, setengah. Hal tersebut dikarenakan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*⁸

Akan tetapi praktik pembagian keuntungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera belum sesuai dengan Syariat Islam keuntungan yang di ambil berdasarkan pinjaman bukan dari kelebihan modal.

4. Mudharabah harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain. Jika ada persyaratan oleh pemilik modal kepada pengelola harta maka itu tidak sah (batal) menurut Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tidak menganggap persyaratan yang demikian itu membatalkan *mudharabah*.⁹ Dari pihak KSPPS tidak membatasi tentang pembiayaan yang di ajukan itu untuk usaha yang produktif atau konsumtif. Itu dikembalikan ke nasabah seutuhnya. Jadi menurut penulis ini belum sesuai dengan akad *mudharabah* yang harud di gunakan untuk modal usaha.

Apa yang dipraktikkan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera ini sama halnya dengan Lembaga Keuangan

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:AMZAH,2010), hal. 375

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004), hal.218-219.

Konvensional yang sudah mematok bunga sejak awal, bukan dari berapa besar keuntungan yang diperoleh tetapi berdasarkan berapa modal yang dipinjam. Tambahan ini diwajibkan untuk nasabah tanpa mempertimbangkan untung rugi.

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam ibadah kaidah yang berlaku adalah:

الأصل في العبادات التوقيف والابتاع

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في العبادات البطلان حتى يقر دليل على الأمر

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hal 4.

Artinya: “Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.¹¹

Dari praktek bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dapat diambil kesimpulan bahwa ada ketentuan pasti mengenai besarnya keuntungan, karena KSPPS BMT NU Sejahtera dalam menentukan bagi hasil dengan prosentase dari besar pinjaman bukan dari hasil keuntungan. Semakin lama jangka waktu angsuran maka semakin besar angsuran yang diberikan. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang ditentukan KSPPS BMT NU Sejahtera. Akan tetapi didalan praktek bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN no 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan pembiayaan *mudharabah* nisbah bagi hasil harus di peruntukkan bagi

¹¹ A. Djazuki, kaidah-kaidah Fiqh: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130

kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Dan penentuan nisbah bagi hasil akad pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan Hukum Islam.

1. Menurut para Fuqaha, akad pembiayaan *mudharabah* antara dua belah pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹²
2. Menurut Hanafiah, *mudharabah* dalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada pihak yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudlarabah* adalah: “Akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan yakni emas dan perak”.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Darul Qutub Islamiyah , hal.

4. Imam Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mudharabah* merupakan "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran hartanya kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama' Syafi'iyah berendapat bahwa *mudharabah* adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan (diperdagangkan)."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan yang berkaitan dengan praktek bagi hasil dalam akad *mudharabah* di KSPPS NU Sejahtera Blora, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari pokok masalah penelitian:

1. Praktik bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang dipraktikkan oleh KSPPS NU Sejahtera secara keseluruhan belum memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diambil oleh pihak KSPPS ini diambil bukan dari jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal akan tetapi diambil dari seberapa besar jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan maka semakin besar pula bagi hasil yang diberikan nasabah kepada pihak KSPPS. Dan modal yang harusnya digunakan untuk hal yang produktif boleh digunakan untuk hal yang konsumtif.
2. Praktek pelaksanaan bagi hasil dalam akad *mudharabah* di KSPPS NU Sejahtera belum sesuai dengan syarat dan rukun dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

tentang pembiayaan *mudharabah* dan belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan nisbah bagi hasil yang dipraktekkan KSPPS BMT NU Sejahtera di peruntukkan untuk satu pihak saja bukan untuk kedua belah pihak. Dan pembagian keuntungan yang diambil oleh KSPPS BMT NU Sejahtera menggunakan sistem bunga, yang mana pembagian keuntungan tetap, dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha nasabah. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa hukum pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera belum sah karena belum memenuhi syarat dan rukun *mudharabah* dalam fatwa DSN MUI.

B. SARAN

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil yang diterapkan KSPPS NU Sejahtera hendaknya sesuai dengan konsep bagi hasil prinsip *mudharabah* yang sesuai dengan fiqh dan literatur ekonomi syariah. Hal ini karena KSPPS NU Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah di mana dalam

mengoperasikan lembaganya itu harus sesuai dengan syariah.

2. Hendaknya anggota atau nasabah di kasih tau tentang konsep mudharabah yang sesuai dengan Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah KSPPS NU Sejahtera, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya mengawasi dengan baik dan secara teliti terutama dalam mengoperasikan lembaganya. Sehingga dalam kinerjanya dilapangan sesuai dengan konsep Syariah.

C. PENUTUP

Syukur al-khamdulillah kepada Allah SWT, sebagai pemberi syafaat yang sempurna kepada makhluk ciptaannya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya referensinya dan lain sebagainya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh dan melengkapi syarat-syarat sarjana starata 1 (satu). Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, “*Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*”, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002).
- Al-Arif M.Nur Riyanto , “*Dasar-dasar Ekonomi Islam*”, (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Albab , M.Harir Ulil, “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.
- Al-Hadi, Abu Hazam, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2017).
- Ali, Zainudin , “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, ((Jakarta:Raja Grafindo Persada:2006).
- Antonia, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Ascarya, “*Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta:PT,RajaGrafindo Persada,2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, “*Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*”, (Jakarta:AMZAH,2014).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV.J-ART, 2005).

Departemen Agama RI, Al-qur'anulkarim, (Syaamil International, 2007), hal.575

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001).

Djamil, Faturrahman “*Filsafat Hukum Islam*”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) 1997.

Djazuki, A, “kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2007).

Djuwaini, Dimyauuddin,”Pengantar Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, 2015).

Ermansyah, Asep, “ *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktek Mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil at-Taqwa kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Fatoni, Nur, “*Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah Untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis Pada Baitut Tamwil Tamziz Wonosobo*”, vol.II, Edisi 2, November 2012, hal.24.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah

Ghoy, Infarul, “*Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Rizki Mandiri Amratani Yogyakarta)*”. Skripsi (Tidak

Diterbitkan), Yogyakarta Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hermansyah ”*Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000*”, (<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/350/283>), di akses 18 November 2018 pukul 23.42.

Huda, Qamarul, “*Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).

Ilmi, Mukhalul “*Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Ismail. “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011).

Jumadi, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri*” (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/share/article/view/1419/1037>), diakses 18 November 2018 pukul 23.36

Karim, Adiwarman A, “*Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Mannan, Muhammad Abdul, “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf ,1995).

Martha, Evi, Sudarti Kresno, *Metodologi penelitian kualitatif untuk bidang kesehatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016).

- Muhamad, “*Managemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN.2002).
- Muhammad, “*Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syari’ah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muhammad, “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muljono, Djoko,”*Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*”,(Yogyakarta: Hak Cipta, 2015).
- Murtadho, Ali, “*Menelaah Mudharabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam*”, vol. XXII, edisi 1, maret 2012, hal.76.
- Muslehuddin, Muhammad , PhD, “*Sistem Perbankan dalam Islam*”, (Jakarta: cet. 3 PT. Rineka Cipta, 2004).
- Muslich, Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta:AMZAH,2010).
- Nawawi, Ismail “*Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*”, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002).
- Ridwan, Muhammad, “*Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*”, (Yogyakarta: UUI Press, 2004).
- Rusyd, Ibnu, “*Bidayatul Mujtahid*”, II, Darul Qutub Islamiyah.
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah*”, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004).
- Sabiq, Sayyid,”*Fiqh Sunnah*”, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*”, Jilid 4, (Jakarta: Cet I, Pena Pundi Aksara, 2006).

- Saebani,Ahmad Beni, Afifuddin , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sangadji, Etta Mamang , Supiah, "Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Peneliitian" ,(Yogyakarta: CV Andi Offfset 2010), hal. 171.
- Sarosa, Samiaji, "*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*", (Jakarta:PT.Indeks, 2012).
- Sjahdeini , Sutan Remy, "*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*", (Jakarta:Pustaka Utama Graffiti, 2007).
- Sudarsono, Heri, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
- Suharto, Saat, "*Pedoman Akad Syariah*", (Jakarta: Perhimpunan BMT Indonesia, 2014).
- Sunggono, Bambang, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suryabrata, Sumardi, "*Metodologi Penelitian*", Cet. Ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Susilo, Edi, "*Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Usman , Rachmadi,"*Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*", (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2009).

Wiroso, *“Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah”*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005).

Yunus, Mahmud, *“Kamus Arab-Indonesia”*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989).

Zubaidah, Siti, *“Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT Ben Taqwa”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2002.

Zuhaili, Wahbah, *“Fiqih Islam Waadilatuhu”*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Buku angsuran nasabah

File dari KSPPS NU Sejahtera

<http://nusaummatsejahtera.wordpress.com/2013/05/21/baitul-mal-wa-tamwil-nu-sejahtera-semarang/> diakses pada 19 November 2018, pukul 13.52

RAT XIII KSPPS Nusa Umat Sejahtera Tutup Buku Tahun 2016
Tanggal 14 Januari 2017 hal.5

Surat perjanjian Al- Mudharabah

Surat perjanjian Al- Mudharabah

Wawancara dengan nasabah (Ali makmun), pada tanggal 28 november 2018

Wawancara dengan teller BMT NU Sejahtera KC.Blora tanggal 27 november

Wawancara dengan Ibu Siti Sri Rejeki pada tanggal 2 Desember 2018

Wawancara dengan Ibu SUNANI pada tanggal 2 Desember 2018

Wawancara dengan Indah Sukawati selaku Manager dan PJS BMT
NU Sejahtera KC.Blora tanggal 27 november 2018

Wawancara dengan Miftahun Ni'mah (admin BMT NU Sejahtera)
tanggal 26 november 2018

Wawancara dengan nasabah (Djasmuri) pada tanggal 27 November
2018

Wawancara dengan nasabah (Nur Solikin) pada tanggal 29 November
2018.

Wawancara dengan suindrawati admin BMT NU Sejahtera tanggal 26
november 2018

Wawancara dengan suindrawati admin BMT NU Sejahtera tanggal 26
november 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kantor KSPPS BMT NU SEJAHTERA
CABANG BLORA



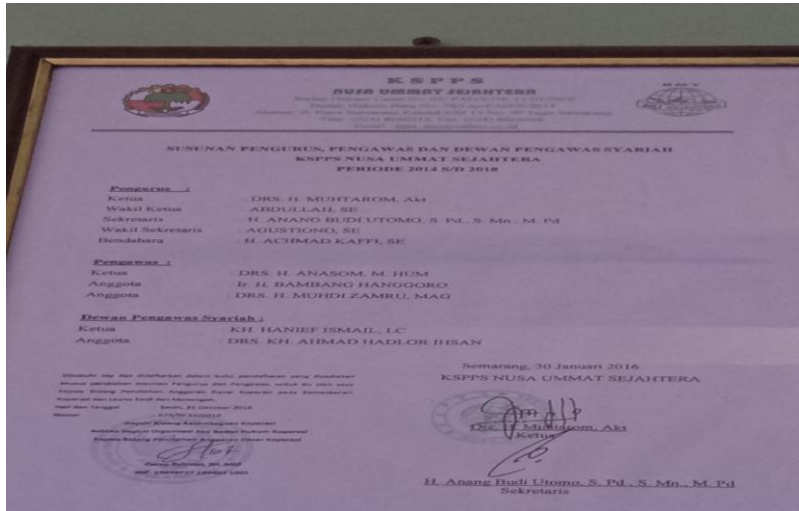
Wawancara dengan Miftahun Ni'mah (Admin KSPPS BMT
NU Sejahtera Cabang Blora)



Wawancara dengan Indah Sukawati (marketing sekaligus PJS
KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Blora)



Wawancara dengan Bapak Sa'dullah pengurus kantor pusat
KSPPS BMT NU Sejahtera



Wawancara dengan saudara fiqo, anggota KSPPS BMT NU
 Sejahtera Pusat

DATA ANGSURAN NASABAH

BMT "NU SEJAHTERA"		TGL. ANGSURAN :		NO. KARTU :	
NAMA	: <u>SUNANI</u>	JANGKA WAKTU	:		
ALAMAT	:	JATUH TEMPO	:		
NO. PEMBIAYAAN	: <u>05690043</u>	ANGSURAN	: <u>2.92.000</u>		
TGL. PEMBIAYAAN	:	- POKOK	: <u>2.50.000</u>		
PLAFOND	: <u>200.000</u>	- B / H	: <u>42.000</u>		
MARK UP	: <u>504.000</u>	PEMBIAYAAN KE	: <u>1</u>		

BMT "NU SEJAHTERA"		TGL. ANGSRAN :	1.	NO. KARTU :	05690029
N A M A	: SITI SRI PELEKI	JANGKA WAKTU	:	12	Bulan
ALAMAT	:	JATUH TEMPO	:	1 - 11 - 2019	
NO. PEMBIAYAAN	: 05690029	ANGSRAN	:	584.000	
TGL. PEMBIAYAAN	: 1 - 11 - 2018	- POKOK	:	900.000	
PLAFOND	: 6.000.000	- B / H	:	84.000	
MARK UP	: 1.000.000	PEMBIAYAAN KE	:	2.	

[illegible]

Catatan : - Kilir bukan merupakan bukti sah pembayaran / setoran
- Mintalah tanda bukti pembayaran / setoran
- Pembayaran lewat 5 hari kena denda 0,25 %

Catatan : - Kitiir bukan merupakan bukti sah pembayaran / setoran
- Mintalah tanda bukti pembayaran / setoran
- Pembayaran lewat 5 hari kena denda 0,25 %

[illegible][illegible]

MARK UP

PEMBIAYAAN KE

Catatan : - Kitiir bukan merupakan bukti sah pembayaran / setoran
- Mintalah tanda bukti pembayaran / setoran
- Pembayaran lewat 5 hari kena denda 0,25 %

NO	NO. LOAN	NAMA	NO. HP	PLAFON	ALAMAT	JADWAL PRY	ANGS	NO. REK
1	05690001	Rihan Supradi	0812-2605-881	4.500.000	Dr Tamboraan 1/2 Blora	5-12-2017 - 7-12-2019	308.750	056700019
2	05690002	Subero		1.000.000	Punggenting 3/2 Majan, Blora	6-12-2017 - 6-12-2018	100.833	056700023
3	05690003	Kusjanto		4.500.000	Klateng 05/02 Purjungan, Blora	8-12-2017 1/1 11-06-2018	112.500	056700036
4	05690004	Sabarinas	08283548837	20.000.000	Klateng 02/01/18 Jiken, Blora	7-02-2018 - 7-02-2021	905.516	056700040
5	05690005	Irwan Sulisti	0827-3641-8479	4.900.000	Klateng 3/03 Jipen, Blora	10-07-2019	357.972	056700049
6	05690006	Sudarmo		4.900.000	Klateng 03/03 Jipen, Blora	23-01-2018 - 23-07-2019	357.972	056700052
7	05690007	GERAN	08283-2851-1670	4.000.000	Sekeloa 01/01 Jipen, Blora	25-01-2018 - 25-07-2019	292.802	056700054
8	05690008	Eka Lunas	0858-02610-2020	4.000.000	Punggenting Majan, Blora	9-03-2018 - 9-06-2018	100.000	056700062
9	05690009	Agus Ramo SP	0806-6852-5204	4.500.000	Punggenting 01/03 Ngasua, Blora	7-03-2018 - 7-03-2020	246.000	056700069
10	05690010	Siti Sri Reteki	0853-8935-4717	4.900.000	Punggenting 01/03 Ngasua, Blora	18-02-2018 - 13-02-2019	144.083	056700087
11	05690011	Siti Astya	0852-0003-2850	3.500.000	Klateng 05/02 Ngasua, Blora	23-02-2018 - 23-02-2019	372.917	056700093
12	05690012	Sabarinas	0821-3388-6560	4.900.000	Klateng 02/01/18 Purjungan, Blora	22-02-2018 - 20-08-2018	122.500	056700094
13	05690013	Purnadi	0828-8067-2539	35.000.000	Klateng 05/02 Jipen, Blora	16-03-2018 - 16-03-2021	1.584.722	056700098

NO	NO. LOAN	NAMA	NO. HP	PLAFON	ALAMAT	JADWAL PBY	ANGS	NO. REK
14.	05690014	Siti Azzah	0850-8491-0356	3.000.000	Kampungk. 02/02 Ngawen, Blora.	13-05-2018 19-03-2018	75000	056700156
15.	05690015	Edi Supriatno	0880-2145-3141	8.000.000	Kendal 02/02 Ngawen, Blora.	18-05-2018 19-06-2018	50.000	056700157
16.	05690016	Muryanti	0880-2522-5520	2.000.000	Kendal 02/02 Gending, Blora.	4-04-2018 4-04-2019	501.667	056700158
17.	05690017	Eka Chotun Riza	0880-0790-2030	4.500.000	Pogoridigra 02/02 Ngawen, Blora.	25-04-2018 05-04-2019	435.500	056700159
18.	05690018	Adi Supriatno	0821-3426-2076	20.000.000	Ngawen 02/01 Ngawen, Blora.	05-04-2018 05-04-2020	1.183.333	056700160
19.	05690019	Imam Sayuti	0850-1201-0380	4.000.000	DK. Kertorejo 02/02 Bogorejo, Blora.	15-04-2018 15-04-2018	100.000	056700161
20.	05690020	Puji Lestari	0850-2616-9188	4.000.000	Bogorejo 02/02 Ngawen, Blora.	13-04-2018 13-04-2018	191.111	056700162
21.	05690021	Ali Makmur	0810-2520-0733	4.500.000	Bogorejo 02/02 Bogorejo, Blora.	25-04-2018 25-04-2019	138.000	056700163
22.	05690022	Yusuf Nurwanto	0880-2355-4747	4.500.000	Gondang 02/02 Kerting, Blora.	02-05-2018 02-11-2018	101.250	056700164
23.	05690023	Yusuf Nurwanto	0822-2555-9207	4.500.000	Gondang 02/02 Kerting, Blora.	02-05-2018 02-11-2018	101.250	056700165
24.	05690024	Dipurno	0850-9168-3294	3.000.000	Pl. Ploso, Samudra Ngawen, Blora.	11-05-2018 11-05-2019	232.000	056700166
25.	05690025	Eka Setiawan	0895-0550-0213	4.500.000	Kampungk. 02/02 Ngawen, Blora.	19-05-2018 19-05-2019	438.000	056700167
26.	05690026	Abdul Chotun	0822-4371-1526	2.000.000	DK. Kertorejo 02/02 Kertorejo, Blora.	25-05-2018 25-05-2019	138.667	056700168

NO	NO. LOAN	NAMA	NO. HP	PLAFON	ALAMAT	JADWAL PBY	ANGS	NO. REK
27.	05690027	Darwito	081328361743	1.000.000	Ploso 02/02 Ngawen, Blora.	04-06-2018 04-06-2019	87.400	056700169
28.	05690028	Edi Supriatno		1.500.000		04-06-2018 04-06-2019	171.000	056700170
29.	05690029	Musa	0823-2660-3415	2.000.000	Ploso, Samudra Bogorejo, Blora.	02-07-2018 02-05-2019	228.000	056700171
30.	05690030	Siti Rahayu	0812-8819-2197	3.000.000	Ploso, Blora.	02-07-2018 02-01-2019	67500	056700172
31.	05690031	Sudrawati		3.900.000	Ngawen, Blora.	05-07-2018 05-07-2020	158.200	056700173
32.	05690032	Andi Zainal Arifin	0895-3040-9316	2.000.000	DK. Sumberagung Bogorejo, Blora.	09-07-2018 10-08-2019	228.000	056700174
33.	05690033	Harqun Sarni		2.500.000		08-08-2018 08-08-2023	637.900	056700175
34.	05690034	Adi Dipurno	0821-3426-2076	35.000.000	Ngawen 02/01 Ngawen, Blora.	07-08-2018 07-08-2021	1.427.300	056700176
35.	05690035	Suharti	0821-3389-5520	12.000.000	Kovongan 02/01 Kovongan, Blora.	21-08-2018 21-08-2021	1.429.333	056700177
36.	05690036	Mahmud Nursolikh	0812-3537-9352	2.000.000	DK. Kertorejo 02/01 Kertorejo, Blora.	14-09-2018 14-09-2019	228.000	056700178
37.	05690037	Dj Asmuni		7.000.000	DK. Ploso, Samudra Ngawen, Blora.	20-09-2018 20-09-2020	239.700	056700179

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Nur Laila Sa'diyah
Tempat/ Tanggal Lahir: Blora, 3 Januari 1994
NIM : 122311089
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam/ Muamalah
Tahun Ajaran : 2012
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Hukum : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ds. Plosorejo, Kec. Banjarejo, Kab. Blora
No hp : 081510894887
Email : lailasakdiyah314@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. R.A Rabiatul Adawiyah lulus tahun 2000
2. MIN Plosorejo lulus tahun 2006
3. Mts Khozinatul 'Ulum Blora lulus tahun 2009
4. MA Khozinatul 'Ulum Blora lulus tahun 2012